

## PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Alkansa Fadila Ramadani<sup>1</sup>, Muslimin<sup>2</sup>  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran<sup>1,2</sup>  
[alkansafadila@gmail.com](mailto:alkansafadila@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan metode *Non-Probability Sampling* juga teknik sampling jenuh. Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2016-2020. Data dianalisis memakai analisis regresi linear berganda bersama bantuan *software SPSS 25*. Hasil penelitian menunjukkan, PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda. Sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh. Namun PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda. Simpulan, Semakin tinggi PAD, kian bagus kinerja keuangan Pemda, dan besaran dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Namun, disisi lain secara bersama-sama PAD dan Dana Perimbangan, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemda.

**Kata Kunci:** Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of PAD and Balancing Funds on the financial performance of local governments. This research method is descriptive quantitative. This research utilizes the Non-Probability Sampling method as well as the saturated sampling technique. The type of data used is secondary data obtained from the 2016-2020 Kediri City Government Budget Realization Report. The data were analyzed using multiple linear regression analysis with the help of SPSS 25 software. The results showed that PAD had a positive effect on local government financial performance. Meanwhile, the Balancing Fund has no effect. However, PAD and the Balancing Fund together have a significant effect on the local government's financial performance. In conclusion, the higher the PAD, the better the local government's financial performance, and the amount of balancing funds does not affect the regional government's financial performance. However, on the other hand, PAD and the Balancing Fund together have a significant impact on the local government's financial performance.*

**Keywords:** *Balancing Fund, Regional Financial Performance, Regional Original Income*

### PENDAHULUAN

Transparansi di dalam pemerintahan akhir-akhir ini memang mulai terus digalakkan, baik itu di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah pun mulai melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi. Penelitian Priyono et al., (2020) menyebutkan bahwa Perubahan sistem menjadi desentralisasi ini pada akhirnya memberikan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama penerapan pola desentralisasi atau pendelegasian kedaulatan kepada pemerintah daerah, jadi akan bisa memberikan kewenangan pengelolaan pemerintahan dari pusat kepada daerah.

Melalui hal ini pada akhirnya mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap daerahnya dan juga mendorong kreativitas dan kerja sama pemerintah dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan daerah tersebut sesuai dengan potensinya. Jadi, pada akhirnya maju atau tidaknya suatu daerah itu nanti tergantung pada bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah masing- masing.

Pada dasarnya Otonomi daerah ini memang sangatlah perlu dilaksanakan untuk melihat seberapa mana kredibilitas suatu daerah dalam menelusuri kapasitas keuangan daerah serta mengelola akar keuangan murni daerah untuk mengisi kebutuhan pemerintah daerah. Hal ini agar daerah tidak serta merta bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan dapat dijadikan sebagai standar dari kredibilitas finansial pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus melaporkan keuangan daerah mereka agar menilai kinerja keuangan mereka ketika melaksanakan pemerintah daerah.

Sumber pendapatan daerah sendiri bersumber dari pajak lokal, retribusi, serta PAD lain yang sah. Seperti halnya Kota Kediri, Kota Kediri memiliki beberapa tantangan keuangan daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2016-2020. Masalah keuangan lokal kota Kediri meliputi, 1) ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat besar, hal ini tercermin dari tingginya pendapatan transfer pemerintah pusat, dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya; 2) Kapasitas daerah untuk sumber pendapatan daerah hal ini tercermin dari relative kecilnya pendapatan yang diperoleh dari PAD dibandingkan dengan pendapatan transfer; 3) kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kediri juga masih tergolong rendah yaitu masih berada dibawah 50%.

**Tabel 1.**  
**Rasio Kemandirian**

Tahun	Realisasi PAD(Rp)	Pendapatan Transfer(Rp)	Rasio Kemandirian
2016	238.318.315.508,41	922.540.893.563,00	25,83%
2017	293.065.134.148,36	935.968.238.485,00	31,31%
2018	249.093.229.531,44	978.609.583.937,00	25,45%
2019	266.745.042.377,64	1.042.645.161.163,00	25,58%
2020	253.814.121.450,00	989.006.560.740,00	25,66%
Rata-rata			26,78%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Kediri (Data Diolah)

Pajak lokal merupakan sumber pendapatan terbesar. Pendapatan daerah awal mencerminkan kemandirian karena pemerintah daerah memiliki lebih banyak kebebasan untuk menggunakan PAD, tidak seperti sumber eksternal (Kadir, 2017). Untuk alasan ini penting bagi pemerintah daerah untuk terus berusaha menaikkan pemasukan daerahnya. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan juga bisa dimanfaatkan dalam menilai kinerja keuangan pemda. Sebagaimana diatur bersama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan ialah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan kajian untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2016-2020.

## KAJIAN TEORI

### *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* menjabarkan hubungan antara tuan dalam hal ini masyarakat dan pelayan atau pemerintah. Hubungan ini tercipta karena para pihak pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan sikap saling percaya, tanggung jawab, berintegritas dan berintegritas satu sama lain. Secara khusus, pemerintah yang memiliki lebih banyak informasi di sektor keuangan diharapkan bisa mencapai transparansi nasional selaras dengan keinginan serta kepercayaan publik.

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sutrisno (2016), kinerja ialah hasil kerja seorang pegawai baik dari segi kuantitas serta kualitas, waktu serta kerjasama agar mencapai tujuan yang telah

ditetapkan oleh organisasi.

### **Rasio Keuangan sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Hasil analisis rasio keuangan dimanfaatkan selaku standar agar, a) menilai otonomi keuangan daerah bersama-sama mendanai pelaksanaan independensi daerah. Berlandaskan hasil penyelidikan rasio fiskal daerah dapat ditentukan derajat kemandirian keuangan daerah; b) pengukuran efektivitas serta efisiensi bersama mewujudkan pemasukan daerah. Berlandaskan hasil penyelidikan rasio keuangan daerah mampu diketahui level efektivitas serta ketepatan keuangan daerah; c) menimbang seluas kegiatan pemerintah daerah menghabiskan pemasukan daerah. Berlandaskan hasil analisis rasio keuangan daerah dapat diketahui apakah pemerintah daerah aktif melakukan belanja dana yang ada dalam rangka pembangunan; d) pengukur kontribusi masing-masing asal dari pendapatan terhadap penciptaan pemasukan daerah. Berlandaskan hasil analisis rasio keuangan daerah, dapat diketahui dana mana yang menunjukkan kontribusi maksimum serta minimum terhadap pemasukan daerah dan pembentukan pendapatan sebelumnya oleh PAD. Untuk pendapatan transfer sendiri terdiri dari transfer kota/kabupaten dan pendapatan lain yang sah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 Angka 18 yang dimaksud dengan pendapatan daerah ialah pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah serta dipungut menurut kaidah pemerintah daerah selaras bersama peraturan perundang-undangan. (PAD) ialah pemasukan yang dihasilkan dari keuangan daerah, dan ketika peran PAD semakin naik dalam struktur fiskal daerah, jadi kian naik pula kredibilitas keuangan daerah guna menjalankan aktivitas pembangunan daerah (Carunia, 2017).

### **Dana Perimbangan**

*Intergovernmental revenue* ialah bantuan tunai dari pusat yang khusus diciptkan demi mendanai program-program pemerintah daerah. Dana perimbangan ini

ialah hasil dari kebijakan desentralisasi pemerintah pusat pada perimbangan keuangan pusat serta daerah. Dana perimbangan ini dari pemasukan APBN dijalankan (secara otonom) pada daerah agar melunasi kepentingan daerah yang terkait dengan aktualisasi desentralisasi.

### **Kerangka Pikir dan Pengembangan Hipotesis Penelitian Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pemasukan dari sumber-sumber di wilayah daerah masing-masing. Semakin tinggi peran PAD dalam struktur keuangan daerah, maka kian naik juga kredibilitas keuangan daerah untuk menjalankan aktivitas pembangunan daerah (Carunia, 2017). PAD yang meningkat ini mampu berpengaruh pada kenaikan kredibilitas pemerintah daerah tersebut, sebab kian besar PAD jadi level kemandirian keuangannya semakin bagus. Studi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah harus bisa membiayai sendiri kepentingan pemerintah tanpa mengandalkan anggaran pemerintah pusat. PAD yang kian besar berarti pemerintah daerah sudah sukses mengembangkan potensi daerah, menggali sumber PAD dengan benar dan memanfaatkannya secara cermat.

Studi yang dilakukan oleh Heryanti et al., (2019) menunjukkan bahwa PAD memiliki efek positif yang besar pada kinerja keuangan Anda. Dengan kata lain, kenaikan PAD menaikkan kredibilitas finansial pemda. Studi ini selaras bersama studi dijalankan oleh Sari et al. (2020) PAD juga akan mempengaruhi kinerja keuangan di Pemkot Sumut.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini berupa studi kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari *website*. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu PAD dan dana perimbangan, sedangkan untuk variable dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam studi ini ialah laporan realisasi anggaran pemerintah kota Kediri tahun 2016-2020. Data yang dimanfaatkan bersama studi ini ialah semua data PAD serta Dana Perimbangan periode 2016-2020 di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri. Teknik Penentuan Sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non-probability sampling dengan

teknik sampling jenuh. Analisis data yang dilakukan adalah uji keabsahan instrument, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Hasil uji statistic deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (%)	5	19.48	23.70	20.6160	1.74341
Dana Perimbangan(%)	5	71.40	77.97	76.0780	2.71903
Kinerja keuangan	5	25.45	31.31	26.7660	2.54390
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berlandaskan hasil diatas didapatkan bahwa kemandirian daerah pemda Kediri sebesar 26,77% dan standar deviasi sebesar 2,54% dari tahun 2016 -2020. Rata-rata derajat kemandirian kota Kediri tergolong rendah. Tahun yang mencerminkan kemandirian tertinggi 31,31% pada tahun 2017. Hal ini memperlihatkan ialah tahun 2017 selaku tahun dengan tingkat kemandirian yang tinggi Sedangkan tahun memerankan level kemandirian daerah terminim yakni tahun 2018 yaitusebesar25,45%. Dari tahun 2016 hingga 2020, PAD Kediri sebesar 20,62% dan standar deviasinya sebesar 1,74%. Standar deviasinya lebih kecil dari rata-ratanya, sehingga sebaran datanya baik dan seragam. Sedangkan untuk dana perimbangan pemda Kediri periode 2016-2020 sebesar 76,07% dengan nilai standar deviasinya sebesar 2,72%. Standar deviasinya lebih kecil dari rata- ratanya, sehingga sebaran datanya baik dan seragam.

### Uji Regresi Linear Berganda

Beberapa uji regresi dijalankan agar memahami pengaruh variabel bebas PAD serta Dana Perimbangan terhadap variabel terikat, kinerja fiskal pemerintah daerah (rasio kemandirian). Hasil dari persamaan regresi yang diproses diberikan.

**Tabel 2.**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-8.585	4.111		-2.089	.172		
1 PAD (%)	1.464	.075	1.003	19.636	.003	.987	1.014
Dana Perimbangan (%)	.068	.048	.073	1.422	.291	.987	1.014

Berlandaskan tabel diatas maka persamaan regresi yang terbentuk ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = -8,585 + 1,464 \text{ PAD} + 0,068 \text{ DP}$$

### Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 <sup>a</sup>	.995	.990	.25819

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (%), PAD (%)

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Koefisien determinasi mengukur pengaruh PAD dan Pembiayaan Perimbangan terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah. Dari tabel di atas terlihat ialah angka Adjusted R-squared adalah 0,995. Artinya 99,5% kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD serta dana neraca. Sisanya (100% -99,5% = 0,5%) diperhitungkan oleh alasan lain di luar model. Jika estimasi kesalahan standar (SEE) ialah 0,25819, maka kian menurun angka SEE, kian akurat model regresi memprediksi variabel dependen.

### Hasil Uji F

Hasil uji f ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	25.752	2	12.876	193.150	.005b
1 Residual	.133	2	.067		

Total	25.886	4
a. Dependent Variable: kinerja keuangan		
b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (%), PAD (%)		

Variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel independen apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$ . Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui tingkat signifikansisebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda

### Hasil Uji Parsial (Uji T)

Hasil uji T ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut ini:

**Tabel 5.**  
**Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8.585	4.111		-2.089	.172
1 PAD (%)	1.464	.075	1.003	19.636	.003
Dana Perimbangan(%)	.068	.048	.073	1.422	.291

a. Dependent Variable: kinerja keuangan

Hasil uji T memperlihatkan pengaruh masing-masing variabel terhadap PAD serta pengaruh dana perimbangan terhadap kredibilitas finansial pemerintah daerah. Relevan variabel PAD adalah  $0,003 < 0,05$ . Dengan hasil ini, H1 diadopsi karena variabel PAD berpengaruh relevan terhadap kinerja keuangan pemda . Lalu untuk variabel dana perimbangan adalah  $0,291 > 0,05$ . Dengan hasil ini maka ditemukan fakta bahwa variabel dana perimbangan tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa H2 dalam studi ini ditolak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berlandaskan pengujian dijalankan, hipotesis pertama studi ini diterima. Hal ini dikarenakan PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Diperlihatkan bersama angka relevan  $0,003 < 0,05$  (kurang dari 5%). Hasil PAD mereka berasal dari sumber- sumber yang ditata di berbagai daerah bersifat pemasukan



pajak, retribusi lain selaras undang- undang. Hasil penelitian ini adalah Konsisten dengan hasil yang dilaporkan oleh Heryanti et al., (2019) dimana PAD akan meningkatkan kinerja keuangan kota/kab di Jawa Timur. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Sari et al., (2020), PAD juga akan mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah di Sumut. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kegiatan ekonomi yang baik di wilayah tersebut. Banyaknya faktor produksi yang dihasilkan menghasilkan pendapatan daerah berupa pajak serta tarif, yang merupakan pendapatan kas daerah. Keuntungan daerah yang tinggi menimbulkan kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik. Bersama studi ini, pemerintah daerah bisa memungut pajak dari publik untuk mendanai roda pemerintahan.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Semakin besar dana perimbangan, kian luas ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah masih mengandalkan pemerintah pusat agar melunasi seluruh kegiatan anggaran daerah. Hasil survei Ermawati et al., (2021) memperlihatkan penerimaan antar pemerintah berdampak negatif terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Maknanya, kian luas penerimaan pajak mingguan, semakin rendah tingkat kemandirian fiskal karena pemerintah daerah masih bergantung pada dana pemerintah pusat. Studi ini juga sesuai dengan temuan Saleh (2020) yang dimana di dalam studi ini yakni dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Hipotesis ke-2 studi ini yaitu dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemda, ditolak sebab angka koefisien regresinya positif pada level relevan  $0,291 < 0,05$ . maknanya angka neraca tidak berpengaruh terhadap kinerja finansial. Studi ini memperlihatkan ada tidaknya dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda kota Kediri.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

PAD serta Dana Perimbangan yakni asal pemasukan bagi kabupaten/kota yang membiayai seluruh kegiatannya. Kedua dana ini penting untuk tata kelola pemda. Studi Azhar (2021) memperlihatkan yakni PAD serta *intervernmental revenue*

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Juga pada penelitian Ayu (2018) PAD serta Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Putri & Damayanti (2019) juga menyebutkan yakni PAD serta *intervenmental revenue* berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan, Lalu ada juga penelitian Saleh (2020) juga menyebutkan yakni PAD serta Dana Perimbangan Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis studi ke-3 ialah PAD dan dana perimbangan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda diterima sebab variabel PAD serta dana perimbangan selaku bersamaan berpengaruh terhadap variabel Y. Hal ini terbukti bersama skor signifikan  $0,000 < 0,05$  (kurang dari 5%). PAD yang lebih besar menunjukkan bahwa pemda dapat menggali sumber pendapatan daerah secara maksimal. Di sisi lain untuk dana perimbangan itu sendiri, dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan daerah asal dimanfaatkan secara optimal dan bijak.

## SIMPULAN

Semakin tinggi PAD, kian bagus kinerja keuangan pemda. Hal ini sebab pemerintah daerah bisa memaksimalkan PAD itu sendiri. Dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Hal ini berarti menolak hipotesis kedua studi ini. Selain itu, ditemukan bahwa besaran dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Namun, disisi lain secara bersama-sama PAD dan Dana Perimbangan, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda se- Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 3(1), 80-96. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164-174. <http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/190>
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ermawati, E., Andaresta, H., & Aswar, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran (Size) Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 1614–1624. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1227>
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja

- Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 98-116. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Kadir, A. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Medan: FISIP USU Press
- Presiden, RI. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834–2861. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i05.p09>
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134. <http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 219-223. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1547>
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group